

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PENYAJIAN DATA

Pemerintah Kabupaten Kendal mulai menerapkan *e-government* sejak tahun 2009, dimana pada saat itu penggunaan webiste sebagai media elektronik sedang marak diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. Tujuan penyediaan layanan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di Kendal maupun di luar Kendal bahwa di Kendal ada berbagai kegiatan dan pembangunan, sehingga webiste resmi Pemerintah Kabupaten Kendal dapat diakses oleh siapapun yang terhubung melalui internet.

Pada bagian bab III ini peneliti menyajikan data hasil penelitian secara kualitatif berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan, hasil observasi dan dokumentasi. Penelitian yang dikaji berkaitan dengan analisis pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi dan hasil wawancara dengan informan-informan terpilih yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah narasumber yang dinilai paham dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

Data-data yang tersaji merupakan data primer yang dihimpun dari hasil lapangan yang didapat melalui wawancara secara mendalam terhadap informan yang terpilih dengan *interview guide*, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian dan penjelasan, serta hasil analisis terhadap data yang diperoleh.

Dengan data primer yang diperoleh, maka akan disajikan juga tentang faktor-faktor yang menghambat pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal

3.1 Deskripsi Informan

Pengertian subjek penelitian adalah individu atau kelompok (informan) yang diharapkan oleh peneliti untuk menceritakan apa yang ia ketahui tentang pokok permasalahan yang akan diteliti. Informan yang baik adalah informan yang dapat dipercaya, mempunyai pandangan yang luas mengenai pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal atau terlibat langsung dengan fokus permasalahan yang akan diteliti, maka informan yang dipilih adalah informan kunci (*key informan*). Sumber informasi dalam penelitian ini adalah narasumber yang dinilai memiliki kompetensi untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Informasi yang didapatkan dari narasumber merupakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam mengenai permasalahan yang disajikan dalam bentuk uraian atau penjelasan.

Di dalam penelitian ini penulis mengambil informan yang berasal dari organisasi formal yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal khususnya Bidang Aplikasi Informatika dan masyarakat Kabupaten Kendal yang secara jelas dapat terlihat identitas mereka pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No	Informan	Nama	Status/Pekerjaan
1.	Informan I	Drs. Muryono, SH, M.Pd	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal
2	Informan II	Drs. Imam Tajudin, MM	Kepala Bidang Aplikasi Informatika
3	Informan III	Hery Aryanto, SH., M.Kom	Kasie Tata Kelola dan Pemberdayaan Informatika
4.	Informan IV	Kiswoyo, SE, MM	Dosen UNISS Kendal
5.	Informan V	Visca Kenia Fitriani	Mahasiswi UNNES

3.2 Pengembangan *E-government* di Kabupaten Kendal

Pengembangan *e-government* merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah melalui penerapan website yang dapat digunakan sebagai media pelayanan informasi dan komunikasi dengan berbagai kalangan seperti masyarakat, instansi pemerintahan, dan *stakeholder*. Pelaksanaan pemerintahan elektronik atau *e-government* tidak hanya sebatas penerapan semata, tetapi perlu dilakukan pengembangan sebagaimana Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Untuk mengetahui pengembangan *e-*

government di Kabupaten Kendal yang berkaitan dengan website resmi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kendal, yaitu www.kendalkab.go.id merupakan faktor penting dalam pengelolaan *e-government* yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. Dalam pengembangan *e-government* tentunya ada suatu tahapan yang digunakan sebagai acuan, yaitu *support*, *capacity*, dan *value* yang kemudian ketiga elemen tersebut akan membentuk pola pengembangan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

3.2.1 Support

Support merupakan elemen pertama yang harus dimiliki pemerintah dalam melaksanakan pengembangan *e-government*, dimana dukungan penuh pemerintah dalam melakukan pengembangan *e-government* menjadi kunci keberhasilan *e-government*. Dukungan tersebut tidak hanya dari kalangan pemerintah saja melainkan ada juga dukungan dari masyarakat maupun *stakeholder* atau pihak swasta. Terdapat dua poin dukungan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan dan pengembangan *e-government*. Dukungan tersebut adalah *political will* yang memuat regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memperkuat *e-government* dan cara pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengembangan *e-government*.

3.2.1.1 Political Will

Political will memuat seberapa jauh kemauan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk merancang *masterplan* dan regulasi yang dimiliki untuk mendukung dan memperkuat jalannya pengelolaan dan pengembangan

website resmi Pemerintah Kabupaten Kendal. Tanpa adanya unsur “*political will*” ini, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “*top down*”, maka jelas dukungan pengembangan *e-government* yang efektif harus dimulai dari pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi sebelum merambat ke level-level dibawahnya. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal yang menjelaskan

“Yang jelas yang semula di *launching* pada tanggal 28 juli 2017 itu tentang UP4 untuk mendukung pelaksanaan *e-gov*. Bupati ini me-*launching* Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, kemudian ada regulasinya dasar pembentukan *include* didalam ini UU 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik, UU 25/ tentang Pelayanan Publik, UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kebetulan dua minggu yang lalu bupati me-*launching* majalah HANDAL, *include* didalamnya ada regulasi. Jadi, saya selaku Kepala Diskominfo mendukung sepenuh hati. Sebelumnya kami kan mengikuti diklat-diklat terkait dengan *e-government*, *e-planning*, *e-budgetting* jadi *e-government* itu nanti mendukung secara keseluruhan sebenarnya dari pemerintah kabupaten sampai ke pemerintah desa itu benar-benar ada satu regulasi yang memayungi kita menerapkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang bagus sehingga tidak sembarangan, terutama Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas nya ini sesuai dengan visi misinya ketika ia maju sebagai Bupati kan ada visi-misi yang disampaikan. Karena impian Bupati ini “Permata Kendal menuju Akses Global” diharapkan bisa mendunia jangan kalah dengan Kabupaten lain” (Wawancara tanggal 12 Desember 2017 jam 11.30)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Bupati selaku pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kendal memberikan dukungan penuh dalam pengembangan *e-government* melalui visi misi dalam pemerintahannya. Selain itu, pengembangan *e-government* juga didukung dengan peluncuran UP4 (Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik). UP4 merupakan Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kendal melalui berbagai kanal media yang terintegrasi secara berjenjang. Dengan adanya UP4 ini diharapkan pengaduan masyarakat dapat ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara.

Pengembangan *e-government* tidak akan berjalan apabila tidak ada dukungan dari masing-masing lembaga yang ada di lingkungan Pemerintah. Artinya tidak hanya pemerintah yang perlu mengelola website, tetapi semua lembaga yang ada di lingkungan pemerintah tersebut juga perlu menerapkan website agar tercipta pertukaran data dan informasi secara *online* dan masing-masing website tersebut juga harus terhubung dengan website master yang dimiliki oleh Pemerintah. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Kasubbag Tata Kelola dan Pemberdayaan Informasi yang menjelaskan

“Untuk website keterbukaan informasi publik itu sekarang kan SKPD pada tahun 2017 ini kan diwajibkan untuk memiliki website, ada beberapa yang sudah memiliki dan ada beberapa yang masih dibangun. Sampai saat ini belum

selesai, mungkin akhir desember mungkin nah itu nanti di website kita tampilan akan diubah. Jadi untuk pemerintahan tidak begitu nantinya mungkin dibuat *link* lah jadi mereka biar mengelola website mereka sendiri nanti rumah dari yang website kabupaten yang besar ini tinggal nge-*link* aja. Dan satu lagi strateginya harus kita perkuat dulu diregulasi, karena regulasi dan *leadership* itu adalah kunci. Karena memang untuk regulasi IT di Kendal itu sangat minim sekali. Karena apa ya mbak ya, saya pernah mengajukan yang namanya perda atau pergub yang namanya IT, untuk memacu agar OPD itu bisa melaksanakan program *e-government*-nya, karena *e-government* kan tidak hanya di diskominfo tetapi menyeluruh kan. Tetapi mereka agak keberatan masalahnya, ya mungkin kalau itu regulasi sudah bisa dibikin dan ada penekanan dari pucuk pimpinan itu mau tidak mau mereka harus melek *e-government*. Selama ini masih parsial sih, masih sendiri-sendiri, terpulau-pulau.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2017)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sampai saat ini masih terdapat beberapa lembaga yang belum menerapkan *e-government*. Belum adanya website di beberapa lembaga ini dapat dipicu oleh belum adanya payung hukum yang kuat dan tidak adanya penekanan secara tegas oleh Pemerintah Kabupaten Kendal sehingga menyebabkan beberapa lembaga hanya memandang *e-government* dengan sebelah mata. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kendal terus berupaya untuk mendukung pengembangan *e-government* yang salah satunya adalah dengan cara mengintegrasikan website master Pemerintah Kabupaten Kendal dengan website-website lembaga yang sudah terbangun dan terintegrasi dengan laman pengaduan pemerintah pusat (www.lapor.go.id) yang dikelola langsung oleh staf kepresidenan.

Kesepakatan pemerintah sebagai langkah untuk mendukung pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal juga dapat dilihat melalui terbangunnya jaringan-jaringan komunikasi dan informasi di desa dan kecamatan berbasis *online* dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bagian Aplikasi Informatika :

“Yang melatarbelakangi itu karena Kendal salah satu yang telah memberikan dari 286 desa 20 kecamatan itu sudah *online*, itu yang melatarbelakangi karena Kendal itu sudah pelaksanaan dengan desa *online* di se-Kabupaten Kendal dan Kecamatan sama semua OPD itu. Terus dibentuk tahun 2016 itu karena kendal menerapkan sistem desa *online* diseluruh wilayah kabupaten kendal sehingga dibutuhkan sdm kepada masyarakat di desa *online* itu, Kendal mempunyai 286 desa di 20 kecamatan. Kalau yang melatarbelakangi ini bahwa kenapa pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Kendal karena Kendal itu sistem informasi keterpaduan sistem informasi yang diberikan kepada desa *online* ini adalah informasi yang harus dilaksanakan di masing-masing desa. Karena keterpaduan teknologi informasi sebagai kunci suksesnya penataan sistem informasi di OPD maupun di Desa *online*. Dan menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Jadi yang melatar belakangi teknologi informasi dengan adanya desa *online* ini agar mereka itu punya pengetahuan di bidang IT, agar kedepan mempunyai nilai tambah perekonomiannya, pengetahuan masyarakat desa itu sendiri dan bidang pemerintahan desa itu untuk adanya esensi di undang-undang desa. Jadi, kewenangannya ya membangun informasi dan kesejahteraan. Pemerintahan desa yang dari sisi sistem perencanaan dalam menyelenggarakan untuk desa itu sendiri.” (Wawancara tanggal 12 Desember jam 09.00)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Kendal telah membangun jaringan komunikasi

dan informasi di 286 desa dan 20 kecamatan. Terbangunnya desa berbasis *online* ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan sumberdaya manusia yang ada di desa mengenai teknologi informasi dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat di bidang perekonomian. Selain itu, perbaikan keterpaduan informasi dan komunikasi dari tingkat bawah ke tingkat atas atau dari tingkat atas ke tingkat bawah menjadi kunci penataan sistem informasi di masing-masing desa.

Berdasarkan informasi-informasi tersebut, dapat dinyatakan bahwa dukungan Pemerintah untuk melakukan pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal sangat didukung oleh pemerintahan yang sedang berjalan ditunjukkan dengan komitmen Bupati Kabupaten Kendal untuk mewujudkan Kendal menjadi kota *smart city* yang tercantum dalam visi, misi dan lima pilar Bupati Kendal yang terus melakukan perbaikan-perbaikan karena adanya tuntutan global yaitu Kendal Permata Pantura. Peluncuran UP4 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal pada peringatan ulangtahun Kabupaten Kendal menjadi salah satu bukti dalam perbaikan layanan publik. Adanya pengembangan *e-government* melalui website pemerintah Kabupaten Kendal terus berupaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik yaitu dengan akuntabilitas, transparansi dan keterpaduan informasi publik. Selain itu, Website resmi Kabupaten Kendal telah melakukan perubahan dalam komunikasi dua arah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk

memberikan saran terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kendal. Dulu website resmi Kabupaten Kendal telah memiliki kotak saran sebagai sarana untuk memberikan kritik dan saran kepada Pemerintah, tetapi kotak saran yang terdahulu belum terintegrasi dengan sistem LAPOR! Yang dimiliki oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah. Dengan terintegrasinya layanan aduan yang tersedia di laman website pemerintah Kabupaten Kendal, maka aduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditanggapi dengan cepat oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. Kelebihan sistem kotak saran ini adalah setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat dapat dibaca langsung oleh pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri.

3.2.2.1 Sosialisasi

Sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengenalkan konsep *e-government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada berbagai kalangan baik pemerintah itu sendiri, masyarakat, dan *stakeholder* atau pun pihak swasta. Sosialisasi *e-government* yang paling baik dan efektif adalah dari mulut ke mulut dalam arti kata adalah bahwa pengalaman sukses seseorang berinteraksi fasilitas teknologi informasi merupakan hal yang sangat berharga seperti pernyataan yang telah disampaikan Kasubbag Tata Kelola dan Pemberdayaan Informasi yang menjelaskan :

“Kita memang berkali-kali itu melakukan rakor OPD maupun PPTIK tentang pengelolaan webiste ini. Terus

disamping itu kita juga melakukan sosialisasi tentang keterpaduan informasi publik ini sampe ke desa, jadi beberapa kali kita melakukan sosialisasi dengan pihak camat dan desa terkait untuk pengelolaan website. Tanggapan mereka positif tapi eksekusinya yang agak terlambat. Kalau sosialisasi ini satu kita melakukan yang namanya pasang spanduk itu tentang desa *online*, kemudian kita juga undang FGD forum-forum diskusi, kemudian ya rakor-rakor gitu. Untuk langsung kemasyarakatnya tahun kemarin ada, kalau tahun ini belum. Cuma secara tidak resmi kita seringkali juga misalkan pas kita melakukan perjalanan kemana kita juga menyampaikan itu. Bahkan kita juga menyampaikan ini lho kita punya lab di Kabupaten, boleh dimanfaatkan oleh organisasi yang ada di *panjenengan*, misalkan PKK atau mungkin kelompok-kelompok apalah itu. Tapi untuk sementara memang kita bisa menyediakan pada saat jam kerja. Lalu saat sosialisasi kritik masukan ya kita terima saja, tetapi kita kan bisa mengklarifikasi lah. Strateginya biasanya kita lakukan diskuloh. Biasanya sering sih LSM kesini, ya tentang apasajalah terutama tentang *e-government* karena kominfo kan melayani itu ya. Dan kita juga sempat dituntut kaitannya dengan website, karena kan website kita belum lengkap kan. Karena itu kita sering dituntut oleh beberapa lembaga termasuk LSM sampai sidang ke KID itu lho sidang ke provinsi. Kalau dulu tentang informasi nya dianggap kurang terus kita dituntut, ada lagi permasalahan yang keterbukaan disuatu desa tentang pembebasan tanah kita tetap yang diikuti” (Wawancara tanggal 6 Desember 2017)

Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh

Kepala Bagian Aplikasi dan Informatika yang menyampaikan :

“Untuk sosialisasi awal itu kami mengadakan pertemuan-pertemuan dan pelatihan serta pembinaan kepada masing-masing OPD. Yang kedua berkaitan dengan jaringan komputer, *software* dan lain sebagainya kami sudah mempersiapkan dari Kominfo. Sehingga untuk kebutuhan yang berkaitan dengan jaringan ini paling tidak mendekati kebutuhan yang diminta. Untuk sosialisasi secara langsung lewat radio, kemudain kanal media *pers* cetak *printing* maupun di UP4 secara langsung sehingga pemanfaatan dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat sudah barang tentu kantor kami artinya dari jam 7 sampai

mungkin kalau servernya 24 jam kalau tenaganya jam kerja. Beberapa kali juga sosialisasi ke SMK maupun siswa-siswa dikumpulkan dan diberi kajian-kajian berkaitan dengan baik undang-undang yang berkaitan dengan itu sudah beberapa kali mengadakan pertemuan secara langsung. Diikuti oleh mahasiswa perguruan tinggi yang ada di Kendal dan siswa-siswa SMK yang ada di Kendal. Saya rasa yang pernah dikasih informasi sosialisasi dengan mahasiswa, masyarakat dan pelajar di Kendal artinya sudah paham benar dan berkali-kali kita undang. Seperti kemarin malam itu yang berkaitan dengan UMKM *online*.” (Wawancara tanggal 12 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dinyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal untuk menyampaikan kepada masyarakat dan OPD tentang pemanfaatan *electronic government* dilakukan secara berkala dengan berbagai cara. Pertemuan, FGD sekaligus pelatihan secara langsung dengan berbagai kalangan masyarakat, OPD, dan siswa atau mahasiswa yang ada di Kabupaten Kendal dengan tujuan untuk mengenalkan pengembangan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan dengan cara penyampaian melalui kanal radio dan media massa baik cetak maupun *online*.

Gambar 3.1

Bupati Kendal Mengenalkan Website melalui Akun Instagram



Sumber : [instagram.com/dr.mirnaannisa/](https://www.instagram.com/dr.mirnaannisa/)

Sosialisasi *e-government* yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk mengenalkan kepada masyarakat dilakukan dengan cara dimuatkan ke dalam berbagai media massa. Salah satu media yang digunakan untuk mensosialisasi *e-government* adalah media sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan *instagram*. Media sosial ini digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal untuk mensosialisasikan *e-government* karena pemerintah menganggap banyak masyarakat yang menggunakan media sosial tersebut.

Gambar 3.2

Sosialisasi Aplikasi *KNOK-KNOK*



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017

Cara sosialisasi ini dapat dilihat pada gambar 3.1, dimana terlihat akun *instagram* Bupati Kabupaten Kendal mensisipkan laman website resmi Kabupaten Kendal sebagai satu langkah mengenalkan *e-government* kepada masyarakat. Dan pada gambar 3.2, dapat dilihat sosialisasi pemerintah untuk mengenalkan aplikasi *Knok-Knok* melalui brosur dan pamflet.

3.2.2 *Capacity*

Kapasitas adalah unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” *e-government* terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal kemampuan atau keberdayaan pemerintah dalam

pengembangan *e-government* yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah, yaitu ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, dan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan manfaat yang diharapkan.

3.2.2.1 Sumber Daya Finansial

Sekecil apapun inisiatif *e-government* yang akan diterapkan pastinya membutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya, sehingga bukan merupakan rahasia lagi bahwa kekuatan sumber daya finansial yang dianggarkan untuk pengembangan *e-government* merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan pengembangan *e-government*. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Kasubbag Tata Kelola dan Pemberdayaan Informasi yang menjelaskan:

“Kalau diskominfo sendiri tahun kemarin sekitar 3M termasuk kehumasan yang bersumber dari APBD. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kehumasan, pengembangan SDM dan pengembangan infrastruktur karena sangat minim sekali. Anggaran masih kurang karena sebetulnya kita pengen mengembangkan *e-gov*, *e-gov* itu kan sangat mahal ya tetapi harus kita kelola baik juga. Jangan sampai kita mengelola *e-gov* untuk pembelanjaannya itu tidak terpenuhi.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2017)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal yang menjelaskan :

“Untuk anggaran apa yang telah disepakati dalam RAPBD kita harus menyesuaikan pembelajaran kita untuk keperluan pengembangan e-government.” (Wawancara tanggal 12 Desember 2017 jam 11.30)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sumber daya finansial untuk pengembangan *e-government* bersumber dari APBD Kabupaten Kendal. Pengembangan *e-government* tidaklah murah sehingga dibutuhkan anggaran yang cukup besar dan pengelolaan yang baik, sementara plafon anggaran yang diberikan pemerintah masih minim. Oleh karena itu, anggaran yang ada dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur.

Pengembangan *e-government* merupakan suatu terobosan bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam melaksanakan pengembangan *e-government* dengan sumber daya finansial yang ada pemerintah harus dapat menentukan kebutuhan strategis masyarakat seperti pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Aplikasi dan Informatika yang menyampaikan :

“Dari dana yang ada itu kalau dibidang sini sudah tentu mengadakan mengusulkan kebutuhan selama satu tahun. Kalau sebagaimana yang kita rencanakan anggaran tersebut tergantung pada plafon APBD yang diberikan kepada masing-masing kasie, karena kebutuhan itu kan sudah dihitung selama satu tahun. Tahun ini ditahun 2018

mengalami penurunan karena diprioritaskan untuk kegiatan infrastruktur, sehingga tidak sesuai dengan plafon anggaran di tahun 2017 soalnya mengalami penurunan hampir 50%. Kita akhirnya merencanakan, memerinci sesuai dengan skala prioritas kegiatan yang mana yang harus kita laksanakan yang urgent banget sebagaimana yang diharapkan masyarakat untuk kepentingan umum kita sesegarakan mungkin yang tidak boleh ditunda. Sehingga kebutuhan tersebut kita harus memaksimalkan anggaran yang ada.” (Wawancara tanggal 12 Desember 2017 jam 09.30)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sumber daya finansial yang dialokasikan untuk pengembangan *e-government* pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu penurunan sebesar 50% dari anggaran sebelumnya. Penurunan jumlah anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam APBD untuk kebutuhan *e-government* jelas mempengaruhi pengembangan *e-government* yang sedang dilaksanakan. Untuk itu pengelola terus mensiasati agar dana yang diberikan mampu mencukupi kebutuhan pengembangan *e-government* dengan cara merinci prioritas kegiatan pengembangan *e-government*.

3.2.2.2 Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur teknologi informasi memuat tentang bagaimana infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kendal untuk menunjang pengelolaan dan pengembangan *e-governemnt*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal yang menjelaskan :

“Untuk infrastruktur sudah memadai, kita sudah mempunyai jaringan sampai ke daerah-daerah yang jauh dari Kendal. Kita juga sudah punya alat kontrol yang bisa digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang sederhana sehingga kita tidak perlu kesana.” (Wawancara tanggal 12 Desember 2017 jam 11.30)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa infrastruktur jaringan yang dimiliki untuk pengembangan *e-government* sudah mencakup ke daerah-daerah yang jauh dari pusat Kota Kendal. Selain itu, pemerintah juga memiliki aplikasi kontrol yang digunakan untuk mengontrol jaringan di masing-masing daerah dan instansi.

Teknologi pendukung yang dimiliki selama ini dibangun untuk menangani masing-masing sektor, sehingga belum terintegrasinya satu dengan yang lainnya tentu saja akan mendatangkan kesulitan besar jika ingin diadakan tukar menukar data atau informasi melalui infrastruktur dan aplikasi beragam yang dimiliki masing-masing institusi. Hal tersebut sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Kasubbag Tata Kelola dan Pemberdayaan Informasi yang menjelaskan :

“Kalau untuk infrastruktur TI sudah memadai kita juga sudah punya alat kontrol yang standby 24 jam, jadi kalau ada jaringan yang error akan ada pemberitahuan disini. Bisa kita perbaikan langsung dari sini jika tidak bisa kita informasikan ke OPD yang terjadi masalah untuk selanjutnya bisa ditindaklanjuti perbaikan ke lokasi jaringan yang error. Untuk website keterbukaan informasi publik itu sekarang kan SKPD pada tahun 2017 ini kan diwajibkan untuk memiliki website, ada beberapa yang sudah memiliki dan ada beberapa yang masih dibangun. Sampai saat ini belum selesai, mungkin akhir desember mungkin nah itu nanti di webiste kita tampilan akan diubah. Jadi untuk pemerintahan tidak begitu nantinya mungkin dibuat link lah jadi mereka biar mengelola webiste mereka

sendiri nanti rumah dari yang webiste kabupaten yang besar ini tinggal nge link aja” (Wawancara tanggal 6 Desember 2017)

Hal yang hampir senada juga disampaikan oleh Bapak Imam Tajudin selaku Kepala Bagian Aplikasi dan Informatika, beliau menyampaikan :

“Untuk Infrastruktur selama ini kita sudah menggunakan server yang bekerja nonstop 24 jam. Kita memang harus maksimal kalau pun ada kekurangan manakala terjadi mati lampu. Tetapi secepatnya anggaran tahun depan unit yang belum ada kita anggarkan”. (Wawancara tanggal 12 Desember 2017 jam 09.30)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang digunakan untuk pengembangan *e-government* terkait dengan *hardware* sudah cukup memadai. Sementara itu, untuk website yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sudah ada beberapa yang memiliki, dan ada yang sedang dalam proses pembangunan dalam arti selama ini belum memiliki website sendiri. Adanya website instansi yang sedang dibangun menyebabkan integrasi antara website master Kabupaten dengan website masing-masing instansi tidak terhubung secara menyeluruh. Padahal intergrasi antar website ini diharapkan mampu meningkatkan keterbukaan informasi publik dari pemerintah kepada masyarakat.

3.2.2.3 Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar pengembangan *e-government* dapat sesuai dengan manfaat yang diharapkan.

Sumber daya manusia memuat berapa jauh kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola dan mengembangkan *e-government*. Untuk menciptakan suatu pola kerja menuju *good governance* dibutuhkan suatu kebiasaan dalam menjalakkannya, seperti pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal yang menjelaskan :

“Segi SDM di Kendal kan ada 60 OPD, Diskominfo dalam hal ini secara menyeluruh kami bersama dengan tim menerapkan transparan dan akuntabilitas. Sehingga masing-masing Bidang include yang dimaksud *e-government* kan pemerintahan dengan serba elektronik termasuk dibawah di lantai satu itu hari ini ada Bintek tentang SIRUP (Sistem Perencanaan Umum Pembangunan) ini juga mengajak semua OPD, ini kan yang kita undang 60 dari kecamatan dan OPD. Nah itu kita mengajak melakukan kebiasaan yang benar menggunakan elektronik tidak menggunakan yang biasa terjadi sudah jalan.” (Wawancara tanggal 12 Desember jam 11.30)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa untuk menciptakan suatu kebiasaan yang baik dibutuhkan kesadaran diri dari masing-masing individu. Melalui penerapan transparansi dan akuntabilitas, kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal mengajak setiap sumber daya manusia yang ada untuk melakukan kebiasaan yang benar dalam menggunakan elektronik, bukan kebiasaan yang selama ini biasa dilakukan yaitu kebiasaan bekerja secara manual.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah juga melakukan bimbingan teknis kepada perwakilan di masing-masing instansi guna menunjang pekerjaan di bidang elektronik.

Sumber daya manusia sebagai pelaksana pengembang *e-government* perlu memiliki kemampuan untuk menghasilkan sebuah rangkaian produk atau pelayanan yang baik dan berkualitas sehingga dibutuhkan kerjasama dari beragam struktur organisasi. Adanya kebiasaan sumber daya manusia yang bekerja berdasarkan perintah dari atasan semata dapat menyebabkan pengembangan *e-governmenet* tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Kasubbag Tata Kelola dan Pemberdayaan Informasi yang menjelaskan :

“Untuk SDM ya masih rendah mbak, karena kan rata-rata pegawainya kan sudah tua jadi mungkin ya memang belum melek sehingga semua masih tersentral disini. Jadi kalau tidak *ditutuk* itu mereka tidak ada inisiasi untuk melaksanakan *e-gov.*” (Wawancara tanggal 6 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia yang ada di instansi lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal untuk mengelola pengembangan *e-government* masih belum *melek*. Kata *melek* disini memiliki arti bahwa tanpa ada perintah dari atasan maka sumber daya manusia yang ada tidak memiliki inisiasi untuk memanfaatkan teknologi elektronik. Hal tersebut berdampak pada pemanfaatan teknologi informasi yang sudah berjalan seperti website

masih tersentral di pihak pengelola website master Kabupaten Kendal yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal.

Perubahan paradigma merupakan hal utama yang harus didahulukan oleh pemerintah dalam mempersiapkan perangkat sumber daya manusia. Untuk itu pemerintah perlu memperhatikan kemampuan dan keberdayaan sumber daya manusia pada saat proses pemilihan perangkat sumber daya manusia, seperti pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Aplikasi dan Informatika yang menyampaikan :

“Untuk SDM di diskominfo hampir setengah dari jumlah pegawai berlatar belakang IT, karena dalam pemilihan SDM terdapat syarat khusus. Sehingga sangat spesifikasi yang ahli IT yang kita prioritaskan.” (Wawancara tanggal 12 Desember 2017 jam 09.30)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dinyatakan bahwa masih Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengelola website master Kabupaten Kendal sudah memiliki sumber daya manusia yang memadai. Pemilihan sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan menjamin berjalannya proses pengembangan *e-government*. Untuk itu dalam proses rekrutmen pegawai, Dinas Komunikasi dan Informasi menetapkan syarat khusus bagi calon pegawai, yaitu memiliki kemampuan di bidang IT dan berlatar belakang IT.

3.2.3 Value

Berbagai inisiatif *e-government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya konsep pengembangan *e-*

government. Dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang memiliki kepentingan. Masyarakat sejauh ini adalah yang mengambil manfaat paling besar, yakni sejauh mana masyarakat Kabupaten Kendal dapat merasakan *e-government* untuk akses publikasi informasi Kabupaten Kendal seperti pelayanan publik, pelayanan komplain, dan akses informasi seputar Kendal. Bagi *stakeholder*, *e-government* dirasakan untuk menggali seberapa besar potensi yang dimiliki untuk menanamkan investasi di Kabupaten Kendal. Dan bagi SKPD adalah untuk mengetahui informasi dan akses yang luas dalam menjangkau masyarakat dengan berbagai kalangan.

3.2.3.1 Bagi Pemerintah

Manfaat *e-government* bagi pemerintah adalah untuk mengetahui informasi dan akses yang luas dalam menjangkau masyarakat dengan berbagai kalangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kendal yang menyampaikan manfaat dari *e-government* bagi pemerintah adalah sebagai berikut :

“Jadi gini, ini kan yang namanya semua menggunakan *e-government* kemudian ada *e-planning* dan *e-budgeting*, tujuan dua sebetulnya supaya ada keterbukaan. Jadi ada transparansi dan kedua akuntabilitas. Kalau uang orang sudah diajak terbuka itu kan harus berani, harus berani mengatakan tidak harus berani mengatakan jangan korupsi. Tetap meskipun tidak hanya sekedar transparansi dan akuntabilitas tapi kondisioner kendal ini lebih bagus, jangan sampai ada pejabat kena OTT. Yang kedua bupati memang secara konsisten menjunjung tinggi integritas.

Integritas itu hukum jadi menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya apa itu keluarga apa itu sahabat tidak dikenal bupati entah itu LSM dan lain-lain tidak dikenal.” (Wawancara tanggal 12 Desember jam 11.30)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dinyatakan bahwa manfaat *e-government* bagi pemerintah adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Adanya transparansi dan akuntabilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kondisioner pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kendal, karena melalui komputer semua rangkaian transaksi terekam dengan baik sehingga dapat dengan mudah diakses sewaktu-waktu dibutuhkan.

E-government memperlihatkan memperlihatkan sebuah keinginan yang sama, yaitu bertransformasinya bentuk-bentuk interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dengan melibatkan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan untuk memperbaiki mutu pelayanan publik seperti yang disampaikan oleh Kasubbag Tata Kelola dan Pemberdayaan Informasi yang menyampaikan bahwa :

“Pelaksanaan e-gov di Kendal ini sangat bermanfaat bagi pemerintah terutama dalam segi pelayanan dan waktu yang semakin, adanya transparansi dan tanggungjawab, dan efektif dan efisien dalam bekerja. Sekarang pelayanan lebih mudah karena semua pelayanan dapat dilakukan melalui online pendaftaran bisa online jadi tidak perlu berdesak-desakan ini juga bisa mengurangi biaya administrasi. Terus itu mbak, informasi-informasi yang akan disampaikan ke masyarakat atau ke dinas lain itu bisa secara online jadi tidak perlu didatangi satu-satu” (Wawancara tanggal 6 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa manfaat lain dari pengembangan *e-government* bagi pemerintah adalah adanya perbaikan pelayanan publik, adanya transparansi dan tanggungjawab, dan lebih efektif dan efisien dalam bekerja. Adanya perbaikan pelayanan publik adalah pemerintah lebih mudah memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah juga menyediakan layanan *online* dalam berbagai pelayanan seperti layanan perizinan online . Hal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan efektif dan efisiensi pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya.

Secara bertahap, apa yang bisa dilayani secara *online* mulai dijalankan. *E-government* proses panjang yang tidak bisa jadi dalam waktu dekat. Karena itu, tahapan proses apa saja yang bisa dilayani secara online akan sangat membantu kesiapan dari berbagai sisi mulai dari sumber daya manusia, teknologi dan juga persiapan masyarakat itu sendiri sevfai pengguna seperti pernyataan yang disampaikan Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika yang menyampaikan :

“Satu sumberdaya manusia bertambah pengetahuan soal umum, kita yang tadinya tidak bisa membaca akhirnya bisa membaca dan memang harus belajar itu tujuan utama kita memberdayakan sumberdaya insani secara maksimal, kemudian nilai tambah kepada masyarakat salah satunya UMKM dengan jaringan online ini karena disini ada *one village one product* jadi jika masing-masing desa punya produk apa bisa di share karena disini ada visit Kendal, mau lihat apa disitu ada semua. Mau lihat anggaran bisa dengan *e-budgetting*. Jadi dengan ini orang itu istilahnya dimudahkan tidak terlalu sulit sepanjang mereka bisa membuka, membaca dan mengakses jaringan IT ini. Dibandingkan dengan mungkin 3 atau 5 tahun yang lalu ini lebih spesifik kemajuan IT sekarang ini untuk

menunjang perekonomian, menunjang kesempatan pelayanan pasti, secara akuntabel pasti dan secara efisiensi pasti.” (Wawancara tanggal 12 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa dengan adanya pengembangan *e-government* ini dapat meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia akan pentingnya teknologi informasi. Adanya promosi produk yang disediakan oleh pemerintah yaitu melalui program *one village one product* tentunya akan meningkatkan daya saing hasil produksi masyarakat pedesaan. Selain itu, manfaat *e-government* bagi pemerintah adalah memberikan pelayanan, meningkatkan tanggungjawab pemerintah, mengurangi biaya administrasi dan memberdayakan masyarakat melalui informasi

3.2.3.2 Bagi Masyarakat

E-government seharusnya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan pemerintah sekaligus mempercepat proses bisnis dan produktivitas dari sisi pemerintahan. *E-government* harus mudah digunakan oleh masyarakat, sehingga mereka mau menggunakan karena kenyamanan dan keuntungan yang ditawarkan seperti pernyataan yang disampaikan oleh salah satu dosen di universitas yang ada di Kabupaten Kendal, Bapak Kiswoyo, SE., MM, yang seringkali mengamati website Kabupaten Kendal. Beliau menyampaikan bahwa :

“Tidak banyak yang dapat kami peroleh karena konten dan informasi yang ditampilkan disana ini sangat minim, disana hanya memunculkan seputar informasi dinas, kemudian struktur organisais visi misi dan kepala dinas. Adapun muatan-muatan yang lain ini tidak begitu banyak,

paling disana hanya memunculkan foto bupati wakil bupati, kemudian visi misi dan dinas-dinas yang ada dibawah naungan kabupaten kendal namun itu isinya hanya berupa informasi yang sangat2 minim yaitu berupa visi misi dan struktur organisai sementara informasi yang lain kami sulit menemuinya.” (Wawancara tanggal 12 Januari 2018)

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan

Sdri. Visca Kenia, Mahasiswi Psikologi UNNES :

“Tidak banyak membantu mbak, inikan kebijakan pemerintah untuk memudahkan masyarakat mencari informasi seputar pemerintah, baik daerah maupun pusat secara online. Jadi dengan adanya *e-gov* berupa website ini kan jadi memudahkan dan menambah informasi seputar kegiatan di Kabupaten Kendal. Tetapi saya pernah mengunjungi website kendal untuk mencari website BPS Kendal, webiste BNN Kendal, untuk keperluan ijin data penelitian dan seputar prosedur pembuatan e-KTP yang belum jadi-jadi. Namun setelah saya mengunjungi informasi yang ingin saya dapatkan itu tidak ada, websittenya juga terlihat jarang di update, jadi ya kurang bermanfaat.” (Wawancara tanggal 20 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dinyatakan bahwa manfaat *e-government* belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat di Kabupaten Kendal. Terlebih menurut narasumber, konten website di Kabupaten Kendal kurang informatif sehingga tidak memudahkan pengguna untuk mencari informasi yang diinginkan. Kurang *update* nya informasi yang ditampilkan di website Pemerintah Kabupaten Kendal ini menyebabkan pengguna merasa kecewa karena informasi yang ingin dicari tidak dapat ditemukan dalam website tersebut.

3.3 Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan *E-government* di Kabupaten Kendal

3.3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk mengelola dan mengembangkan *e-government*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Tata Kelola dan Pemberdayaan Informasi yang menjelaskan :

“Untuk visi misi inginnya lebih baik karena kita ingin ke arah data terintegrasi, interoperabilitas data masih kita susun karena permintaan dari pemprov data harus SDS (single data system). Sehingga data yang ada di kabupaten kendal bisa ditarik ke provinsi. Namun karena masih adanya keterbatasan SDM dan yang terpenting lagi keterbatasan regulasi kita belum bisa menarik data yang ada di e-gov.”

Hal yang senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika yang menyampaikan :

“Dari segi SDM itu kita masih perlu pelatihan, terus SDM yang ada di setiap SKPD juga perlu ditingkatkan. Terus kita juga perlu kerjasama dengan komunitas-komunitas IT sehingga dapat membantu pekerjaan kita seperti konten di website. Karena selama ini masih parsial sih mbak, jadi semua pelaksanaan *e-gov* itu yang mengerjakan kita.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dinyatakan bahwa sumberdaya manusia masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Kendal dalam melakukan pengembangan *e-government*. Belum adanya inisiasi pemerintah untuk memberikan pelatihan secara khusus kepada sumberdaya manusia yang ada di

lingkungan OPD pemerintah Kabupaten Kendal menyebabkan pengelolaan website di masing-masing OPD tidak berfungsi.

3.3.2 Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur teknologi seringkali menjadi kendala pelaksanaan *e-government* di negara berkembang. *E-government* memang menuntut adanya berbagai teknologi informasi dan komunikasi dalam lembaga pemerintah beserta infrastruktur penunjang yang andal dan terdapat secara merata di seluruh wilayah.

Infrastruktur teknologi informasi merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan *e-government*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbag Tata Kelola dan Pemberdayaan Informasi yang menjelaskan :

“Perlu adanya kita mengelola yang namanya komunitas-komunitas IT, kemudian kalau saya itu pengen yang adanya manajemen, intelegent manajemen itu mbak. Itu merupakan aplikasi yang bisa menarik semua berita baik di media sosial, berita elektronik maupun berita cetak. Itu bisa menarik itu kemudian aplikasi ini bisa menyimpulkan mana sih berita yang jelek tapi kita belum punya sih. Sebenarnya kita pengen sekali megusulkan itu tetapi kita memang terbatas di anggaran mbak, karena untuk tahun ini kita memang terbatas di anggaran tetapi kalau strateginya kita pengen melakukan yang namanya kalau pak kepala dinas itu membentuk yang namanya Dewan TIK.” (Wawancara tanggal 6 Desember 2017)

Hal yang senada juga disampaikan oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika yang menyampaikan :

“Untuk Infrastruktur selama ini kita sudah menggunakan server yang bekerja nonstop 24 jam. Kita memang harus maksimal kalau pun ada kekurangan manakala terjadi mati lampu. Tetapi

secepatnya anggaran tahun depan unit yang belum ada kita anggarkan.” (Wawancara tanggal 12 Desember 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa terbatasnya anggaran untuk pengembangan *e-government* di Kabupaten Kendal menghambat pembelajaran aplikasi yang memiliki nilai cukup mahal. Selain itu, belum dimilikinya *genset* yang memadai sebagai tenaga pengganti ketika listrik mati menyebabkan *server down* saat terjadi pemadaman listrik.